

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- . *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- . *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah Edisi Revisi*. Bandung : CV Mandar Maju, 2018.
- . *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Edisi Revisi*. Bandung : CV Mandar Maju, 2019.
- Adrianto. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Anugerah, Muhammad Widya Iswara Rizky dan Agus Wibowo. *Pendaftaran Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melampaui Batas Waktu*. Semarang : Badan Penerbit STIEPARI Press, 2023.
- Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu : MIH Unihaz, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Ginting, Lilawati. *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan*. Medan : Pustaka Bangsa Press. 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987.
- Haji, Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit (Dalam Perjanjian Kredit Bank)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang : Yoga Pratama. 2024.
- Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher. 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya : CV Elvaretta Buana. 2024.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Nusa Media. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2003.
- , *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Rohman, Holilur, dkk. *Kompas Transformasi Hukum Jaminan (Arah Pembaharuan Dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan di Indonesia)*. Bogor : PT Karya Ilmu Bermanfaat. 2024.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Menggugat Kepastian Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju, 2022.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arkola. 2003.
- Suparji. *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*. Jakarta : UAI Press. 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan ketiga)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah Hak Tanggungan*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

JURNAL & TESIS

- Adisti, Maghfira Dwi, Dian Bakti Setiawan, dan Delfiyanti. “Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Ditunda Pemberian dan Nomor Tanggal Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps), *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no.4 (2025).
- Akirin. “Keabsahan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Ditandatangani Sebelum Tanggal Akta Diterbitkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”. Tesis Universitas Islam Sultan Agung, (2022). <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30774>.
- Ammade, Filla Rahmat Dhiva, Fadlikal Aqdam Nugraha, dkk, “Tantangan dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon

L. Fuller di Indonesia”, *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).

Anantio, Reksi Yanuar. “Kedudukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Pengikat Jaminan Hak Tanggungan”. Tesis Universitas Islam Sultan Agung, (2023). <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32419>.

Anhar, Hanifah Indriyani. ““Akibat Hukum Bagi Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 530/Pdt.G/2016/PN. Dps.)”, Tesis Universitas Islam Indonesia, (2024).

Artanti, Melinda Nur dan Sri Budi Purwaningsih. “Analisis Penerapan Sistem Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Online”, *ATHENA : Journal of Social, Culture and Society* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58905/athena.v3i2.427>

Asril, Juli. “Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah”, *JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA)* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.836>

Azizah, Nur, Abdul Halim Barkatullah, Noor Hafidah. “Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara)”, *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.12>

Devi, Yunita. “Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Dalam Perjanjian Kredit Yang Penandatangananannya Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 121K/PDT/2016)”. Tesis Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, (2022). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19597>.

Dewi, Elvira Rosdiana, Lia Amaliya, Muhamad Abas. “Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik”, *Collegium Stodiosum Journal* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1297>.

Fambudi, Hendrik Setio, dkk. “Aspek Hukum Asas Spesialitas Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Jember: Universitas Jember, (2013). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58661>.

Herdhianto, Verido Dwiki, Sunny Ummul Firdaus, dkk, “Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (*Omnibus Law in the Principles of Legality's Framework*)”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (Maret, 2022): 3477. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1345>.

Jalil, Abdul. “Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)”, *Administrative Law & Governance Journal* 4, no.2 (2021). <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.313%20-%20325>

- Jannah, Miftahul. "Pelaksanaan Penandatanganan Akta Oleh Penerima Kuasa Dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Oleh Notaris". Tesis Universitas Diponegoro, (2007). https://eprints.undip.ac.id/15726/1/Miftahul_Jannah.
- Jaya, I Wayan Paramarta, Hanif Nur Widhiyanti, dan Siti Noer Endah. "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik", *Rechtidee* 12, no. 2 (2017).
- Kholiq, Muhammad Idam. "Implikasi Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dilakukan Tidak Dihadapan Notaris (Studi Kasus pada BPR BKK Jepara). Universitas Islam Sultan Agung, (2024). https://repository.unissula.ac.id/33512/1/Magister%20Kenotariatan_21302200058.
- Lasut, Stephen Ricardo. "Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Sebagai Dasar Pemberian Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996", *Lex Et Societatis* 7, no. 8, (2019). <https://doi.org/10.35796/les.v7i8.26964>.
- Maya, Evi Apita. "Kedudukan dan Kewenangan Majelis kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris, *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.455>.
- Mustamu, Julia. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi). *SASI* 20, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.323>
- Nasiha, E. D., Siti Malikhatun Badriyah, Irma Cahyaningtyas. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan)", *Notarius* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43750>
- Noor, Aslan, Mohamad Bima Dwika, Alviraisah Rodiah, dan Ryan Aditya Hardian. "Rekonseptualisasi Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1467>.
- Pratama, Brilliant, Happy Warsito, dan Herman Adriyansah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Notaris", *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Pratama, Helmi. "Kewenangan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Pembuatan Akta Risalah RUPS Melalui Media Elektronik". Tesis Universitas Jambi. (2023).
- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", *Acta Comitas Jurnal Hukum*

- Kenotariatan* 3 no. 3 (2018). <https://jurnal.harianregional.com/actacomitas/id-41555>.
- Putri, Agnes Arti Citra. "Perbedaan Penafsiran Tentang Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Masa Berlakunya SKMHT Antara Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali", *Private Law* 1, no. 1 (2013). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/148723>.
- Rahmadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmarking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Recital Review* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>.
- Ravena, Dey. "Mencandra Hukum Progresif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2007). <https://doi.org/10.29313/sh.v9i3.477>.
- Rianto, Surya, Santy Fitnawati WN, dkk, "Peraturan Hukum tentang Pemberian Hak Tanggungan Tanah", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2710>.
- Rio, Jon. "Implementasi dan Akibat Hukum Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)". Tesis Universitas Islam Indonesia. (2016).
- Rusli, Tami. "Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Terhadap Hak Milik Atas Tanah", *PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2008). <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/119/0>
- Sagari, Damar dan Mujiati, "Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten", *Jurnal Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166>
- Samudra, Bayu Sukma Galuh. Tanggungjawab dan Konsekuensi Hukum Bagi PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Peningkatan Menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang Melebihi Jangka Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang, Tesis Univeristas Brawijaya, (2018).
- Saputro, Daffa Mulyo. "Akibat Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dengan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9708>
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* 3, no. 1 (2015). ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030
- Siahaan, Ade Yuliany dan Aida Nur Hasanah. "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan", *Al-Usrah: Jurnal Al-*

ahwal As-Syakhsyah 11, no. 01 (2023). <https://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v1i1.16650>

Silviana, Ana. “Fungsi SKMHT Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)”, *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8174/4297>.

Sufriadi. “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.35586/.v1i1.141>.

Sulistyaningrum, Ike. “Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pengikatan Kredit Modal Kerja”. Universitas Islam Sultan Agung, (2023). <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33132>.

Tjia, Metta dan David Tan. “Keabsahan Dari Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.28946/rpt.v1i1.1714>.

Tulenan, Ghita Aprillia. “Kedudukan dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris”, *Jurnal Lex Administratum* 2, no. 2 (2014). ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4745/0.

Usman, Rachmadi. “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dengan Akta”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018). ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/222.

Walewangko, Naomi Meriam. “Proses Pemberian Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”, *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016). ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11829.

Wiyono, Agus. “Kedudukan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Terlambat Didaftarkan”, *JURTAMA (Jurnal Kenotariatan Narotama)* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.802>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah